



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UNTUNG SAEFUL ROKHMAN
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. NHK : 817313

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.488.850.000**

1. Tanah Seluas 3117 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 391.000.000
3. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 510.700.000
4. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 532.150.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 577.000.000**

1. MOBIL, HONDA H-RV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, HONDA E1FO2N12M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOTOR, YAMAHA BG6 A/T X-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 56.500.000
4. MOTOR, VESPA VESPA/VESPA SPRINT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 6.826.358**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.072.676.358

III. HUTANG

Rp. 381.828.116

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.690.848.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.